



PERTENTANGAN REZIM VIKTOR ORBÁN TERHADAP NILAI-NILAI UNI EROPA TAHUN 2021-2024

¹Ailsa Purwabhagawanta Saskirana Laksono & ²Rendy Wirawan

¹ Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda

² Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda

rendy.wirawan@fisip.unmul.ac.id

Received 3 January 2026; Revised: 7 January 2026; Accepted: 9 January 2026; Published: 30 January 2026; Available online: January 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk pertentangan terhadap nilai-nilai fundamental Uni Eropa yang tercantum dalam Pasal 2 Traktat tentang Uni Eropa oleh pemerintahan Viktor Orbán. Penelitian ini menggunakan konsep demokrasi liberal melalui enam nilai Uni Eropa, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak kelompok minoritas. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini mengkaji sejumlah kebijakan domestik pemerintahan Orbán mulai dari reformasi sistem pemilu, restrukturisasi lembaga peradilan, konsolidasi media, kebijakan anti-imigrasi, hingga regulasi anti-LGBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hungaria secara formal masih menjalankan prosedur elektoral tetapi praktik politik serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orbán semakin menjauh dari nilai-nilai Uni Eropa. Konsolidasi kekuasaan dan agenda iliberal yang dijalankan mencerminkan adanya pertentangan terhadap nilai keanggotaan Uni Eropa.

Key Word: Viktor Orbán, Hungaria, Uni Eropa, nilai-nilai Uni Eropa

ABSTRACT

This study describes forms of clashes against the fundamental values of the European Union as enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union by Viktor Orbán's government. Within liberal democracy as the main framework, this research focuses on six EU values: respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, including the rights of minorities. Using a descriptive qualitative approach, the study examines various domestic policies under Orbán's administration – ranging from electoral reform and judicial restructuring to media consolidation, anti-immigration measures, and anti-LGBT regulations. The findings show that while Hungary formally maintains electoral procedures, its political practices increasingly diverge from EU values.

Orbán's consolidation of power and illiberal agenda represent a structural conflict against the normative foundations of EU membership.

Key Word: Viktor Orbán, Hungary, European Union, EU values

PENDAHULUAN

Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang dibangun atas dasar komitmen terhadap nilai-nilai fundamental sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 *Treaty on European Union* (TEU), meliputi penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi prinsip dasar yang wajib dipegang setiap negara anggota. Di samping itu, Pasal 7 TEU memberikan instrumen hukum bagi Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara anggota yang melakukan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut. Hungaria, sebagai salah satu negara anggota, menjadi contoh penting dalam konteks ini. Negara tersebut mengalami transisi dari rezim komunis menuju sistem demokrasi pada 1990-an, kemudian bergabung dengan Uni Eropa pada 2004. Keanggotaan Hungaria semula membawa banyak keuntungan, baik secara politik maupun ekonomi, seperti akses terhadap pasar tunggal, bantuan dana pembangunan, serta peningkatan posisi strategis di kawasan Eropa Tengah.

Pada tahap awal integrasinya, hubungan Hungaria dengan Uni Eropa berjalan cukup harmonis. Hungaria menerima aliran dana pembangunan, termasuk melalui *European Development Policy* (EDP), yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, sejak pemerintahan Viktor Orbán dari partai Fidesz berkuasa pada 2010, hubungan tersebut mulai menghadapi ketegangan serius. Sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintah, mulai dari amandemen konstitusi, pengendalian independensi peradilan, pembatasan kebebasan media, hingga intervensi terhadap dunia akademik, dipandang bertentangan dengan prinsip demokrasi liberal yang menjadi landasan Uni Eropa. Ketegangan ini mendorong Uni Eropa untuk merespons melalui mekanisme penegakan hukum, termasuk aktivasi Pasal 7 TEU, penerapan mekanisme *rule of law conditionality*, serta pembekuan sebagian dana bantuan bagi Hungaria. Situasi tersebut menempatkan Hungaria sebagai salah satu negara anggota yang paling mencolok dalam perdebatan mengenai kemunduran demokrasi atau *democracy backsliding* di Eropa.

Kajian-kajian terdahulu seperti Seongcheol (2020) dalam tulisannya, *Illiberal democracy' after post-democracy : Revisiting the case of Hungary*, menekankan bahwa kebijakan Viktor Orbán menandai pergeseran Hungaria ke arah *illiberal democracy* yang menantang kerangka demokrasi liberal Uni Eropa. Ágh (2019) dalam tulisannya, *The Decline of Democracy in East-Central Europe*, menguraikan bagaimana *democracy backsliding* di Hungaria mencerminkan krisis politik domestik yang berimplikasi pada integrasi regional. Sementara itu, Mos (2020) melalui *Ambiguity and interpretive politics in the crisis of European values: evidence from Hungary*, menggarisbawahi adanya ambiguitas nilai demokrasi yang dimanfaatkan oleh rezim Orbán untuk mempertahankan legitimasi politik sekaligus menantang norma-norma yang dijunjung Uni Eropa. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung berfokus pada dinamika internal Hungaria atau pada kerangka konsep umum mengenai kemunduran demokrasi, dan belum secara langsung menempatkan pertentangan antara rezim Orbán dengan nilai-nilai Uni Eropa sebagai pusat analisis.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dalam menyoroti secara khusus benturan antara kebijakan pemerintahan Viktor Orbán dan nilai-nilai

demokrasi liberal Uni Eropa. Fokus ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya, karena menekankan pertentangan nilai sebagai inti permasalahan, bukan semata-mata sebagai konsekuensi dari dinamika politik domestik atau krisis demokrasi secara umum. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana benturan antara nilai-nilai Uni Eropa dan praktik politik di tingkat negara anggota dapat mengancam integritas organisasi supranasional tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan bagaimana rezim Viktor Orbán bertentangan dengan nilai-nilai Uni Eropa untuk menjawab konsistensi penerapan nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi Uni Eropa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bentuk dan dinamika pertentangan rezim Viktor Orbán terhadap nilai-nilai Uni Eropa dengan menggunakan konsep demokrasi liberal sebagai kerangka analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hubungan internasional dan studi integrasi regional, khususnya terkait tantangan terhadap demokrasi di dalam Uni Eropa. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memahami

implikasi politik dari krisis nilai di Uni Eropa sekaligus memberikan gambaran mengenai urgensi penguatan instrumen penegakan hukum dan norma di dalam organisasi tersebut.

METODE

Nilai-nilai Uni Eropa yang tercantum dalam *Treaty of European Union* Pasal 2, meliputi human dignity, kebebasan, demokrasi, *rule of law*, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Nilai tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi liberal yang tidak hanya menekankan pemilu bebas dan adil, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, kebebasan sipil, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances* (Zakaria, 1997). Sebagai organisasi regional supranasional, nilai ini menjadi kriteria utama keanggotaan Uni Eropa (Kochenov, 2015).

Human dignity dipandang sebagai prinsip tertinggi dalam sistem hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* bahwa martabat manusia tidak dapat dilanggar (European Union, 2000, Pasal 1). Nilai kebebasan meliputi kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, serta bergerak di wilayah negara anggota, yang menjadi dasar pluralisme media dan pasar

terbuka (Weiler, 1999). Demokrasi ditegaskan melalui prinsip demokrasi representatif dalam Pasal 10 TEU, yang menuntut legitimasi elektoral, partisipasi sipil, serta sistem *checks and balances* (Moravcsik, 2002). Kesetaraan diatur dalam Pasal 20 *Charter of Fundamental Rights*, yang melarang diskriminasi atas dasar gender, etnis, agama, atau orientasi seksual, dan ditegakkan melalui *anti-discrimination directives* (Bell, 2002). Prinsip *rule of law* menjamin independensi peradilan, kepastian hukum, serta penerapan hukum tanpa diskriminasi (Kochenov, 2015). Sementara itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia dijamin oleh *European Convention on Human Rights* serta *Charter of Fundamental Rights* (Alston & Weiler, 1999).

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menjelaskan fenomena pertentangan antara rezim Viktor Orbán dan nilai-nilai Uni Eropa. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel statis berupa nilai-nilai Uni Eropa dan variabel dinamis berupa kebijakan Viktor Orbán. Fokus penelitian dibatasi pada konteks Hungaria dengan rentang waktu 2010–2024 agar analisis tetap relevan dan terarah.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Perjanjian Uni Eropa tahun 1992, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan laporan

penelitian terdahulu (Bungin, 2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengolah literatur yang relevan (Zed, 2003). Analisis data bersifat kualitatif, yaitu dengan mengorganisasi data, menyajikannya secara sistematis, dan menarik kesimpulan berdasarkan persamaan maupun perbedaan untuk memahami secara komprehensif bentuk pertentangan rezim Viktor Orbán terhadap nilai-nilai Uni Eropa.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan pola pertentangan terhadap nilai-nilai Uni Eropa yang telah dimulai sejak periode kedua pemerintahan Viktor Orbán pada 2010–2014. Pada periode ini, Orbán mengambil langkah awal untuk memperkuat posisinya di pemerintahan nasional melalui koalisi dan perubahan regulasi pemilihan umum. Ia mulai membentuk pemerintahan yang disebut sebagai demokrasi illiberal dalam pidatonya di Tusnádfürdő pada 2014, menegaskan bahwa Hungaria akan mengutamakan nasionalisme dan identitas nasional tanpa menghilangkan kebebasan individu.

Pemerintahan Orbán memanfaatkan supermajority di parlemen untuk mengesahkan undang-undang pemilu baru yang

secara signifikan mengubah sistem elektoral Hungaria. Salah satu perubahan utama adalah pengurangan jumlah kursi parlemen dari 386 menjadi 199, serta penghapusan sistem putaran kedua dalam pemilihan anggota parlemen. Sistem baru ini mengadopsi sistem mayoritas satu putaran untuk distrik tunggal, yang menguntungkan partai besar seperti Fidesz karena partai kecil dan kandidat independen kehilangan peluang berkompetisi secara adil (Bánkuti, et. al., 2012).

Selain itu, aturan baru memperkenalkan sistem pendaftaran pemilih awal dan memungkinkan pemilih luar negeri, khususnya etnis Hungaria di negara tetangga, untuk memberikan suara, sementara warga Hungaria yang tinggal di luar negeri karena alasan ekonomi diwajibkan kembali ke tempat tinggal resmi mereka untuk dapat memilih. Kebijakan ini dikritik karena memberikan keistimewaan pada diaspora yang cenderung pro-Fidesz dan menyulitkan warga urban yang lebih kritis terhadap pemerintah (Bozóki & Hegedűs, 2018).

Orbán juga melakukan gerrymandering pada tahun 2011, mengubah peta konstituen Hungaria. Jumlah daerah pemilihan dikurangi dari 176 menjadi 106 (Bánkuti, Halmai, & Scheppele, 2012). Daerah perkotaan yang cenderung mendukung oposisi, terutama

Budapest, dipecah dan digabungkan dengan wilayah pinggiran yang lebih konservatif, sehingga memperlemah suara oposisi. Dengan peta baru ini, Fidesz berhasil mengamankan mayoritas besar di parlemen meskipun persentase suara nasional yang diperoleh tidak melebihi lima puluh persen (Enyedi, 2020).

Dukungan publik terhadap Orbán juga dipengaruhi oleh retorika populis yang menekankan identitas nasional serta sikap anti-asing dan anti-Barat (Mudde & Cristóbal, 2017). Strategi ini diperkuat dengan isu imigrasi dan kebijakan anti-LGBT dalam era globalisasi yang dianggap sebagai ancaman identitas nasional (Nuha, M.U., et al. 2024)

Keberhasilan ekonomi, seperti pemotongan tagihan listrik sebesar sepuluh hingga dua puluh lima persen pada 2013, tunjangan keluarga sebesar 12.200 hingga 14.400 Forint per anak, serta pemotongan pajak sebesar 62.500 hingga 206.500 Forint per anak, turut meningkatkan citra pemerintah (Csaba Weiner & REKK, 2022; Szikra, 2014; Visual Politik, 2021). Hal ini tentu memperkuat posisi Orbán karena para pemilih mempertimbangkan keuntungan yang diperolehnya ketika memilih (Bangun, C & Raffiudin, R., 2022) dan faktor ekonomi yang mempengaruhi partisipasi politik (Putra, N. & Hendrik, D., 2025).

Dengan supermajority, partai pengusung Orbán, Fidesz, mengamandemen konstitusi pada 2011 dan 2013, yang melemahkan independensi peradilan. Pengangkatan Tünde Handó sebagai presiden National Judiciary Office menjadi contoh bagaimana pemerintah mengontrol sistem peradilan (Reuters, 2012; Varga, 2017; Human Rights Watch, 2013). Handó mengubah sistem peradilan dengan memangkas jumlah hakim dan membatasi lembaga pengangkatan sebelumnya, sehingga memperbesar pengaruh pemerintah dalam menentukan putusan hukum.

Langkah-langkah selanjutnya terlihat pada periode berikutnya, di mana Orbán menerapkan kebijakan kontroversial terkait imigrasi, menutup perbatasan Hungaria-Serbia pada 2015, menolak kuota tambahan 120.000 migran Uni Eropa pada 2016, serta membangun pagar kawat berduri dengan sensor panas (The Guardian, 2015; BBC, 2016; Politico, 2018). Kebijakan ini disertai retorika konspiratif terhadap George Soros dan penerbitan Stop Soros Law pada 2018, yang menargetkan LSM pendukung migran (Amnesty International, 2018).

Selain itu, kebijakan anti-LGBT diperkuat melalui larangan akses anak di bawah umur terhadap konten LGBT, penggantian istilah

gender menjadi gender at birth dalam dokumen sipil melalui Omnibus Law 2020, serta pembatasan konten LGBT di media dan pendidikan (European Parliament, 2020; Human Rights Watch, 2020; BBC, 2021; Human Rights Watch, 2021; The Guardian, 2021; Reuters, 2021; Politico, 2022; AP News, 2022). Kebijakan ini menjadi bagian dari nasionalisme kristiani Orbán yang menolak nilai-nilai liberal Barat.

Orbán juga membentuk Central European Press and Media Foundation pada 2018 untuk mengonsolidasikan lebih dari 400 outlet media yang mendukung pemerintah secara terbuka (BBC, 2023). Kondisi ini berdampak signifikan pada Pemilu 2022, di mana oposisi kesulitan menjangkau publik, penyalahgunaan sumber daya negara memobilisasi pendukung Fidesz, dan media publik menyiarkan program pro-pemerintah secara dominan (National Election Office, 2022; Bíró-Nagy, 2022; Hungarian Helsinki Committee, 2022; Freedom House, 2023; France 24, 2022). Orbán kembali memenangkan pemilu dengan 133 dari 199 kursi, meskipun opini publik terhadap dampak kepemimpinannya pada demokrasi tetap terbagi (Hungarian Central Statistical Office, 2024; Clancy, 2022).

Secara keseluruhan, pemerintahan Orbán menegaskan prinsip

demokrasi liberal melalui kontrol media, reformasi konstitusi dan pemilu, kebijakan sosial konservatif, serta pembatasan hak minoritas. Uni Eropa merespons melalui Pasal 7, sanksi ekonomi, dan gugatan hukum di Pengadilan Eropa terkait pelanggaran demokrasi liberal, meski implementasinya terhambat oleh kepentingan politik internal (Court of Justice of the European Union, 2023). Kebijakan ini memperlihatkan pertentangan nyata antara rezim Viktor Orbán dan nilai-nilai demokrasi liberal yang dijunjung Uni Eropa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Viktor Orbán selama lima periode pemerintahannya secara konsisten mencerminkan model *illiberal democracy*, yang menantang prinsip-prinsip demokrasi liberal sebagaimana dijunjung oleh Uni Eropa. Temuan ini sejalan dengan Seongcheol (2020), yang menekankan bahwa kebijakan Orbán menandai pergeseran Hungaria ke arah *illiberal democracy*. Data penelitian memperkuat kesimpulan ini melalui bukti konkret, seperti perubahan sistem pemilu sejak 2011 yang menguntungkan Fidesz, manipulasi batas distrik pemilihan, dan kontrol ketat terhadap media melalui pembentukan KESMA pada 2018. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana dominasi politik partai berkuasa dipertahankan dengan

cara yang mengurangi pluralitas politik dan akses masyarakat terhadap informasi objektif, sehingga melemahkan prinsip demokrasi liberal.

Temuan penelitian juga menyoroti dimensi sosial dan ideologis dari kebijakan Orbán yang tidak dibahas secara mendalam dalam kajian Seongcheol. Seongcheol (2020) menekankan bahwa kebijakan Orbán menandai pergeseran Hungaria ke arah *illiberal democracy*, namun tidak membahas secara rinci kebijakan sosial yang menyasar kelompok minoritas. Dalam penelitian ini, terlihat secara jelas bahwa kebijakan anti-LGBT, seperti Omnibus Law pasal 33 tahun 2020, undang-undang perlindungan anak 2021, serta pembatasan konten LGBT di sekolah dan media, menunjukkan bahwa pemerintah membatasi kebebasan individu dalam ekspresi identitas seksual. Kebijakan ini sejalan dengan retorika nasionalis kristiani Orbán yang menekankan perlindungan nilai-nilai keluarga tradisional dan identitas budaya nasional, sekaligus menandai penolakan terhadap nilai-nilai liberal Barat, yang menambah dimensi ideologis yang sebelumnya kurang dijelaskan dalam kajian Seongcheol.

Kebijakan anti-imigran Orbán tercermin melalui pembangunan pagar perbatasan Hungaria-Serbia pada 2015, penolakan kuota

tambahan pengungsi Uni Eropa 2016, serta penerapan hukum darurat yang memungkinkan militer menggunakan senjata tidak mematikan terhadap pengungsi dan mengkriminalisasi imigrasi ilegal. Strategi ini menekankan pendekatan proteksionis dan eksklusif dalam konteks imigrasi, serta memperlihatkan bagaimana isu imigran digunakan untuk memperkuat narasi anti-Barat dan legitimasi politik rezim Orbán. Temuan ini sesuai dengan Mos (2020), yang menekankan adanya ambiguitas nilai demokrasi yang dimanfaatkan rezim Orbán untuk mempertahankan legitimasi politik. Namun, penelitian ini menunjukkan secara lebih konkret bagaimana ambiguitas tersebut diwujudkan dalam kebijakan anti-imigran, di mana prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dikompromikan demi kepentingan politik domestik, sehingga menambahkan bukti empiris yang lebih spesifik dibandingkan Mos.

Hasil penelitian juga mendukung temuan Ágh (2019) terkait *democracy backsliding* di Hungaria sebagai refleksi dari krisis politik domestik. Ágh menguraikan bagaimana perubahan konstitusi dan konsolidasi kekuasaan melemahkan institusi demokrasi, namun penelitian ini menambahkan detail mekanisme yang digunakan oleh Orbán, termasuk pengendalian

Mahkamah Konstitusi, intervensi dalam penunjukan hakim, serta pembatasan *checks and balances*. Hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi kekuasaan tidak hanya berupa perubahan struktural, tetapi juga dilakukan secara sistematis untuk mempertahankan dominasi Fidesz di parlemen dan membatasi peran oposisi serta minoritas dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman Ágh dengan menekankan praktik-praktik spesifik yang digunakan untuk menegaskan kontrol politik dan sosial, yang sebelumnya tidak dibahas secara rinci.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Viktor Orbán di Hungaria secara konsisten mempertentangkan nilai-nilai dasar Uni Eropa, terutama prinsip-prinsip demokrasi liberal, melalui pembentukan model *illiberal democracy* yang menekankan nasionalisme, kontrol negara yang kuat, serta penolakan terhadap liberalisme Barat. Kebijakan-kebijakan terkait amandemen konstitusi, konsolidasi media, pembatasan kebebasan politik, serta posisi pemerintah dalam isu imigrasi dan hak-hak LGBT menunjukkan bahwa rezim Orbán tidak hanya berselisih dalam kebijakan, tetapi telah membangun model pemerintahan

yang bertentangan dengan nilai-nilai Uni Eropa. Temuan ini menegaskan perlunya evaluasi serius oleh Uni Eropa terhadap komitmen Hungaria sebagai anggota, serta membuka peluang dialog yang memungkinkan negara tersebut menjaga identitas tradisional dan model pemerintahannya tanpa sepenuhnya mengabaikan prinsip-prinsip keanggotaan Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2021. *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: pedoman penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada perundang-undangan periode 2014-2020*. Bandung: Manggu.
- Alston, P., & Weiler, J. H. H. (1999). *An 'ever closer union' in need of a human rights policy: The European Union and human rights*. Oxford University Press.
- Bell, M. (2002). *Anti-discrimination law and the European Union*. Oxford University Press.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, an Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.
- Mudde, C. & R. K. Cristóbal (2017). *Populism: A Very*

- Short Introduction. Oxford University Press.
- Weiler, J. H. H. (1999). *The constitution of Europe: "Do the new clothes have an emperor?" and other essays on European integration.* Cambridge University Press.
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Yayasan Obor Indonesia.
- Jurnal:**
- Ágh, A. (2019). The Decline of Democracy in East-Central Europe: Hungary as the Worst-Case Scenario. *Problems of Post-Communism*, 63(5-6), 277-287.
- Bangun, C. D., & Raffiudin, R. (2022, November 18). Pengaruh faktor pilihan rasional terhadap tingginya jumlah voters abstention di Kota Medan pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Bánkuti, M., Halmai, G., & Scheppele, K. L. (2012). "Hungary's Illiberal Turn: Dissecting the Orbán Regime." *Journal of Democracy*, 23(3), 138-146.
- Bozóki, A. & Hegedűs, D. (2018). An externally constrained hybrid regime: Hungary in the European Union. *Democratization*, 25(7), 1173-1189.
- Enyedi, Z. (2020). Democratic Backsliding and Academic Freedom in Hungary. *Perspectives on Politics*, 16(4), 1067-1074.
- Kim, S. (2023). 'Illiberal Democracy' after Post-Democracy: Revisiting the Case of Hungary. *The Political Quarterly*, 94, 437-444.
- Kochenov, D. (2015). The EU's rule of law framework and the rule of law backsliding in the Member States. *Hague Journal on the Rule of Law*, 7(2), 511-535.
- Moravcsik, A. (2002). In defence of the 'democratic deficit': Reassessing legitimacy in the European Union. *Journal of Common Market Studies*, 40(4), 603-624.
- Mos, M. (2020). Ambiguity and interpretive politics in the crisis of European values: evidence from Hungary. *East European Politics*, 36(2), 267-287.
- Nuha, M. U., et. al (2024, September). Memperkokoh identitas nasional pada generasi muda untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah globalisasi. *JISIPOL: Jurnal*

- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(3), 54–67.
- Putra, N., & Hendrik, D. (2025, Mei). Pengaruh faktor ekonomi terhadap perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Padang Selatan pada Pilkada 2024. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 49–57.
- Szikra, D. (2014). Democracy and welfare in hard times: The social policy of the Orbán Government in Hungary between 2010 and 2014. *Journal of European Social Policy*, 24(5), 486-500.
- Weiner, Cs. (2022). The Hungarian utility cost reduction programme: An impact assessment. *Energy Strategy Reviews*, 40, 100817.
- Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy. *Foreign Affairs*, 76(6), 22–43.
- Laporan:**
- Amnesty International. (2018). Hungary: Stop Soros Law Criminalizes Help to Migrants.
- AEA-EAL. (2020, December 17). Judgment in case C-808/18: Commission v. Hungary.
- Clancy, L. (2022, August 3). Hungarians differ in their evaluations of democracy under Orbán's leadership. Pew Research Center.
- Court of Justice of the European Union. (2023). Judgment on Hungary's Immigration and NGO Laws. Case C-78/21.
- European Parliament. (2020). Hungary's Omnibus Bill and Article 33: An Attack on Trans Rights.
- European Union. (2000). Charter of Fundamental Rights of the European Union. *Official Journal of the European Communities*, C 364/1.
- Human Rights Watch. (2013). Wrong direction on rights: Assessing the impact of Hungary's new constitution and laws.
- National Election Office. (2022). 2022 Hungarian parliamentary election results.
- Website:**
- <https://www.bbc.com/news/world-europe-35652655> . Diakses pada 25 Februari 2024
- <https://www.bbc.com/news/world-europe-37528325> . Diakses pada 12 Oktober 2024
- https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Viktor_Orban . Diakses pada 12 Oktober 2024
- <https://www.theguardian.com/world/2006/sep/18/1> . Diakses pada 12 Oktober 2024
- <https://www.theguardian.com/world/2015/jun/22/migrant>

[s-hungary-border-fence-wall-serbia](#) . Diakses pada 7 Januari 2024

<https://www.ksh.hu/?lang=en#:~:text=Hungary's%20GDP%20reached%20HUF%2019%2C088> . Diakses pada 4 Februari 2024

<https://www.politico.eu/article/Orbán-migrants-threaten-christian-europe-identity-refugees-asylum-crisis/> .
Diakses pada 12 Oktober 2024

<https://www.politico.eu/article/viktor-Orbán-hungary-doesnt-want-muslim-invaders/> . Diakses pada 12 Oktober 2024

<https://www.reuters.com/world/europe/hungary-orders-shops-cover-up-lgbt-themed-childrens-books-2021-08-06/> .
Diakses pada 12 Oktober 2024